

Jurnal Ilmiah **Postulate**

Volume IX, No. 01, Bulan April 2020

- Penerapan Hukum Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Dilarang Merokok (KDM) di DKI Jakarta (Tinjauan Yuridis Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok)
Hotma Juni Tua, Bambang Heri Supriyanto

- Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Selamat Tambunan, Bambang Heri Supriyanto

- Psikologi Emosi Dalam Tuntunan Al-Quran, H. Arifin Abdullah, Lc, M.A.

- Peran dan Status Hukum Tindak Pidana Penadahan Atas Penerapan Keadilan Restoratif Muhammad
Nasruddin, SH, MH

- Kedudukan Koperasi Dalam Hubungan Ekonomi Bangsa,
Efiani

- Kebijakan Publik VS Kearifan Lokal (Studi kasus Masyarakat Sibolga Sumatra Utara Khususnya Wilayah Bukit Barisan Sumatra Utara)
Drs. Amrul N. Sitompul, M.Si

- Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Surplus/Defisit Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019, Hasmayati



UNIVERSITAS AZZAHRA



Creating Bright Futures

KEBIJAKAN PUBLIK VS KEARIFAN LOKAL

Studi kasus Masyarakat Sibolga Sumatera Utara Khususnya Wilayah Bukit Barisan Sumatera Utara

Drs. Amrul N. Sitompul. M.Si
Dosen Tetap DPK Fisip Universitas Azzahara

ABSTRAK

Kegiatan pembangunan dan modernisasi teknologi dan informasi menurut banyak referensi berpengaruh signifikan terhadap eksistensi kearifan lokal. Percepatan laju pembangunan di segala sector menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam. Pergeseran nilai terjadi semakin cepat karena pembangunan berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan tatanan sosial dalam masyarakat dan fungsi ekologi dari kearifan lokal masyarakat.

Pemerintah atas nama pembangunan sering mengabaikan pengetahuan dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang telah dilakukannya secara turun temurun. Hal ini diindikasikan oleh upaya-upaya pemerintah, seperti dalam hal meningkatkan produksi pangan (padi) melalui subsidi harga untuk pupuk dan petisida/herbisida, peningkatan produksi semen untuk pembangunan infrastruktur dengan mengeksploitasi lahan-lahan produktif seperti Sibolga Sumatera Utara.

Penelitian terhadap kebijakan publik vs kearifan local sudah banyak dilakukan dan dipublikasi namun kali ini penulis berharap bahwa penelitian terhadap kebijakan pembangunan pabrik semen di Sibolga Sumatera Utara tidak lagi menggerus tatanan dan pranata sosial yang telah dijaga oleh masyarakat. Sementara metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analisis yang bersumber dari data-data sekunder serta wawancara mendalam dengan beberapa nara sumber yang representative.

Harapannya penelitian ini memberikan inspirasi bagi para pemangku kepentingan untuk tetap menjaga keseimbangan antara kearifan lokal dengan kepentingan ekonomi. Ekosistem wilayah Sibolga Sumatera Utara tetap terjaga, kebutuhan ekonomi masyarakat terpenuhi dan kemajuan daerah dapat terwujud.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Kearifan Lokal, Peningkatan Kesejahteraan



Creating Bright Futures

PUBLIC POLICY VS LOCAL AWARENESS
Case study of the Sibolga Community of North Sumatra

Drs. Amrul N. Sitompul. M.Si
Permanent Lecturer of DPK Fisip Azzahara University

ABSTRACT

According to many references, development activities and modernization of technology and information have a significant effect on the existence of local wisdom. The acceleration of the pace of development in all sectors has led to a paradigm shift in natural resource management. The shift in value occurs more rapidly because development focuses on economic growth and does not pay attention to the social order in society and the ecological functions of the community's local wisdom. The government, in the name of development, often ignores local knowledge and wisdom in managing natural resources that have been carried out from generation to generation. This is indicated by government efforts, such as increasing food production (rice) through subsidized prices for fertilizers and pesticides / herbicides, increasing cement production for infrastructure development by exploiting productive lands such as Sibolga, North Sumatra. Research on public policy vs local wisdom has been widely carried out and published, but this time the author hopes that research on the policy of building a cement factory in Sibolga, North Sumatra will no longer erode social structures and institutions that have been guarded by the community. Meanwhile, the method used in this research is descriptive analysis sourced from secondary data and in-depth interviews with several representative sources. It is hoped that this research will provide inspiration for stakeholders to maintain a balance between local wisdom and economic interests. The ecosystem of the North Sibolga Sumatara area is maintained, the economic needs of the community are met and regional progress can be realized.

Keywords: Public Policy, Local Wisdom, Increased Welfare



1. PENDAHULUAN

Berbicara tentang semua keputusan dari Pemerintah masalah Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Sebagai sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks dimana kebijakan beroperasi. Sementara itu, kebijakan yang merujuk pada kerangka kerja pembangunan, memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan ke dalam beragam program dan proyek. Sebagai sebuah perubahan terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan ke dalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat.

Dari hasil yang bisa diperoleh dari Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah mengenai "bagaimana" meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat kita sebut sebagai kebijakan. Fungsi kebijakan disini adalah untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-program pembangunan dan pelayanan sosial yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pembangunan akan memberikan hasil yang optimal apabila memperhatikan berbagai dimensi secara seimbang dan proporsional. Pengalaman Indonesia pada tahap-tahap awal pembangunan, memberi pesan jelas bahwa untuk memacu dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan

kesejahteraan sosial yang adil, pendekatan pembangunan harus mempertimbangkan aspek-aspek social. Pendekatan sosial dan ekonomi harus diterapkan bersamaan dalam strategi pembangunan. Keduanya harus dirancang dan dilaksanakan secara seimbang, saling mengisi, saling melengkapi dan saling memperkuat satu sama lain.

Pada aras global kemenangan ideologi kapitalisme atas rivalnya sosialisme dan komunisme telah memperkuat hegemoni globalisasi dan memperlemah faham *welfare state* (Negara kesejahteraan). Sejak Francis Fukuyama melahirkan buku *best sellernya*, *The end of history and The last Man* (1992) kapitalisme yang mengedepankan demokrasi liberal, hak asasi manusia dan pasar bebas kini semakin ditengarai menjadi nilai-nilai universal bangsa manusia, karena nilai-nilai lain telah dianggap buntu menemui akhir sejarahnya (*The end of History*). Semenjak itu, model negara kesejahteraan di berbagai belahan dunia mengalami transisi dan dekonstruksi yang luar biasa.

Bagi Indonesia, kegagalan pendekatan pembangunan yang berporos pada pertumbuhan ekonomi yang berwajah sentralistik dan bersifat *top-down* telah menumbuhkan kesadaran sekaligus tekad para pegiat pembangunan di Indonesia untuk memasukkan dimensi pemberdayaan kedalam strategi pembangunan nasional. Masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan yang tadinya tidak dilibatkan dan bahkan diasingkan dari proses pembangunan, kini dipandang sebagai aktor sentral yang memiliki potensi dan kemampuan dalam mengembangkan kualitas hidupnya.

Mereka tidak lagi dianggap hanya sebagai penerima pasif dari berbagai ragam kegiatan pembangunan. Mereka diberdayakan agar memiliki kapasitas dalam mengorganisir



Creating Bright Futures

dan mengambil keputusan, merespon berbagai permasalahan, serta memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri berkelanjutan. Konsep dan terminologi pembangunan yang bermatra pemberdayaan; seperti partisipatoris, emansipatoris, inisiatif lokal, kearifan lokal, berbasis masyarakat, berpusat pada rakyat kini semakin dipandang sebagai keniscayaan strategi pembangunan nasional.

1. TINJAUAN PUSTAKA

Literatur tentang kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. **Easton (1969)**: Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah. Sementara menurut Mustopadidjaja (2002): Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik,

ada baiknya jika kita membatasi beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan dimplementasikan oleh Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berusaha merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan public juga bisa dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karena tidak memerlukan tindakan.



Creating Bright Futures

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau lebih, dimana kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Dalam konteks Pembangunan Nasional kebijakan publik sering kali menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, mengingat kebijakan publik belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Indikator utamanya adalah tingginya ketimpangan dan kemiskinan. Angka kemiskinan ini akan lebih besar lagi jika dalam kategori kemiskinan dimasukkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kini jumlahnya cukup tinggi.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial meliputi gelandangan, pengemis, anak jalanan, yatim piatu, jompo terlantar dan penyandang cacat yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum kondisi PMKS lebih memprihatinkan ketimbang orang miskin. Selain memiliki kekurangan pangan, sandang dan papan, kelompok rentan (*vulnerable*

group) ini mengalami pula ketelantaran psikologis, sosial dan politik.

Kebijakan Publik yang Pro Pembangunan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan dan muara dari agenda pembangunan ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan pasal keekonomian berada pada BAB XIV UUD 1945 yang berjudul "kesejahteraan social". Menurut Sri Edi Swasono (2001), " Dengan menempatkan pasal 33 UUD 1945 di bawah judul Bab "Kesejahteraan Sosial" itu, berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan social. Peningkatan kesejahteraan social merupakan tes untuk keberhasilan pembangunan, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi apalagi kemegahan pembangunan fisik".

Bergulirnya otonomi daerah bukannya semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan masyarakat miskin. Pemberian wewenang yang lebih besar kepada Pemda dalam mengelola pembangunan daerah belum diikuti dengan penguatan piranti kebijakan dan strategi pembangunan social. Bahkan terdapat ironi di beberapa daerah dimana institusi kesejahteraan social yang sudah mapan peranannya justru malah dikurangi.

Terkesan kuat, pengalihan pembangunan sosial hanya dianggap sebagai beban tambahan bagi anggaran pemerintah daerah. Tidak sedikit Pemda yang hanya mau menerima penguatan dan peralihan wewenang dalam pengelolaan dan peningkatan sumber-sumber "Pendapatan



Creating Bright Futures

Asli Daerah” (PAD). Sedangkan peralihan tugas dan peran menangani “Permasalahan Sosial Asli Daerah” (PSAD) inginnya diserahkan kepada masyarakat, lembaga-lembaga social dan keagamaan.

Sementara literaturse kearifan lokal tidak hanya kita temui dalam upacara keagamaan dan kedaerahan semata namun beberapa tinjauan ilmiah dan akademis juga bisa kita uraikan. Definisi kearifan local bervariasi menurut referensi dan cakupannya, namun dari definisi tersebut terdapat beberapa kata kunci, yaitu: pengetahuan, gagasan, nilai, ketrampilan, pengalaman, tingkah laku, dan kebiasaan adat yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah tertentu (Keraf, 2002; Ardana, 2005; Aprianto dkk, 2008; Wahyu dalam Mukti, 2010; Yamani, 2011).

Pengetahuan dan pengalaman masyarakat, menurut Sunaryo (2003), menyatu dengan system norma, kepercayaan, kebersamaan, keadilan yang diekspresikan sebagai tradisi masyarakat sebagai hasil abstraksi dan interaksinya dengan alam dan lingkungan di sekitarnya dalam kurun waktu yang lama. Kearifan local, karena itu menjadi pedoman dalam sikap dan bertindak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat (Wardana, 2005).

Kearifan lokal merupakan modal sosial yang sangat penting karena merupakan tatanan sosial budaya dalam bentuk pengetahuan, norma, peraturan dan ketrampilan masyarakat di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan (hidup) bersama yang diwariskan secara turun temurun. Kearifan lokal merupakan modal social yang dikembangkan masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan social budaya masyarakat dengan kelestarian sumber daya alam di sekitarnya.

Sumber daya alam, di daerah-daerah yang kearifan lokalnya masih berjalan, merupakan hak milik komunal setiap anggota masyarakat hukum adat atau dikenal dengan *common property resources*. Konsep *common property resources* adalah konsep universal mengingat sumber daya alam didalamnya termasuk air merupakan bagian dari wilayah (hutan) yang dimiliki secara bersama dengan segala kewajiban yang melekat pada semua anggota masyarakat.

Rasa “memiliki” masyarakat terhadap sumber daya ini sangat tinggi dan arena itu mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi dari gangguan dan eksploitasi dari luar.

Common property resources mengalami pergeseran dari pengelolaan oleh masyarakat beralih kepada pemerintah atau stakeholder lain. Pengalihan hak pengaturan sumber daya alam seperti hutan, air yang biasanya dikelola oleh masyarakat adat kepada pemerintah merupakan satu alasan penting memudarnya rasa memiliki atau *sense of belonging* masyarakat. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya rasa tanggung jawab yang terpatri dalam kearifan lokal masyarakat.

PEMBAHASAN

Kebijakan Publik dan Proyek Pembangunan Nasional

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempercepat pembangunan proyek infrastruktur, mulai dari irigasi, bendungan, pembangkit listrik, tol laut, kawasan industri, perumahan, sampai jalan tol dan pelabuhan. Untuk menunjang realisasi



Creating Bright Futures

tersebut pemerintah sangat membutuhkan anggaran salah satunya adalah peningkatan kapasitas produksi semen yang merupakan salah satu kebutuhan bahan baku pembangunan infrastruktur.

Menurut data dari Kementerian Perindustrian, telah ada sebanyak 12 investor yang siap menggelontorkan dana sekitar US\$ 6,68 miliar (Rp 65,03 triliun) untuk membangun pabrik semen di Indonesia pada 2013-2017. Investasi tersebut akan melambungkan kapasitas produksi semen di Tanah Air menjadi 108,77 juta ton, atau bertambah 48,3 juta ton dari akhir 2012 sebanyak 60,47 juta ton.

Sebagai perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara, Semen Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi cita-cita para pejuang dalam mengisi kemerdekaan. Pembangunan Semen Indonesia juga bagian dari upaya untuk membangun kesejahteraan bangsa. Meskipun dalam pendiriannya di Berbagai daerah menuai kontroversi, namun Semen Indonesia akan tetap bertahan sebab memiliki investasi besar yang juga memberikan keuntungan besar untuk perekonomian masyarakat Indonesia pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menyatakan pembangunan pabrik semen di Indonesia, telah mencapai 100 persen.

Jika ditinjau kembali, tujuan didirikannya Semen di Indonesia adalah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang tinggal di pulau Jawa, sehingga menjadikan Jawa sebagai Pulau yang paling banyak konsumennya. Selanjutnya disusul oleh Pulau Sumatera dan berikutnya Sulawesi.

Di Indonesia sendiri, berdirinya pabrik semen selain membangun titik baru pertumbuhan ekonomi juga menegaskan kesiapannya sebagai daerah tujuan investasi berskala besar. Permintaan semen di masa mendatang akan kian meningkat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin stabil, selain itu besarnya belanja infrastruktur pemerintah, serta kian makmurnya penduduk juga mempengaruhi adanya peningkatan tersebut.

Masyarakat yang tekun dalam bertani, dan pantang melakukan bisnis, jika sawah sebagai sumber penghidupan itu harus diambil untuk kepentingan pabrik, kalau tidak punya sawah?". Kejujuran nurani sedulur Sikep sedang diuji dengan gemuruhnya pembangunan ekonomi dan modernitas, masyarakat samin dengan kesederhanaan, keyakinan, serta menjaga kearifan sekarang berbenturan dengan kepentingan ekonomi yang didukung birokrasi yang kuat.

Keentingan ekonomi dan kearifan lokal berbenturan dengan keras pada suatu daerah kecil yang jauh dari keramaian. Pemimpin daerah (yang selama ini mengabaikan keberadaan masyarakat Samin) menjadi terkendala, dengan munculnya sikap penolakan secara gencar, hal ini perlu pertimbangan secara mendalam, pembangunan bentuknya tidak harus modern dan maju secara ekonomi dari angka-angka statistik semata, juga harus melihat nilai dan budaya masyarakat yang dipelihara secara bertahun. Masyarakat Sikep yang filosofinya hidup dengan bertani (yang seharusnya dibina dan didukung program pemerintah yang sekarang harus melipat gandakan hasil pangan), malah dikesampingkan. Mereka tidak perlu tanda pahlawan, dan tanda jasa.

Oleh karena itu perlu ada langkah strategis dan sikap yang arif dari pemimpin



Creating Bright Futures

birokrat di pusat dan daerah. Mengapa harus mengorbankan Pegunungan bukit barisan dengan mengusik keseimbangan alam yang selama ini selalu memberikan penghidupan masyarakat sekitar ? Seharusnya Menteri LH menanggapi pengaduan masyarakat Sibolga dengan mengeluarkan rekomendasi untuk segera melakukan penelitian mengenai dampak lingkungan dari rencana perluasan pabrik semen Andalas dengan melibatkan tiga perguruan tinggi diatas, serta melibatkan unsur-unsur LSM setempat agar hasilnya dapat dipertanggung- jawabkan.

Reaksi penolakan terhadap pembangunan pabrik semen tidak hanya terjadi di tingkat lolal Penolakan yang disertai dengan aksi menyemen sebagian kaki para pengunjuk rasa tidak hanya diikuti oleh kaum laki-laki semata, tapi tidak sedikit kaum perempuan yang rela melakukan aksi tersebut. Bahkan dari aksi tersebut pada akhirnya telah merenggut nyawa seorang perempuan (peserta aksi) sebagai tumbal keangkuhan sebuah kebijakan.

3. Fenomena Kotamadya Sibolga

Wilayah Kotamadya Sibolga terdiri dari lebih kurang 1007 Km² yang berjumlah penduduk lebih kurang menurut sensus terakhir Tahun 2019 sebanyak 87.102 warga merupakan suatu kekayaan alam yang sangat berguna dan berarti bagi warga di sekitar wilayah jajaran Bukit Barisan yang terletak di Kawasan pulau Sumatra Utara pegunungan ini berada di bagian jajaran Bukit Barisan tepatnya mulai dari wilayah Aceh sampai pada

perbatasan Sumatera Barat. dalam pegunungan ini terdapat banyak kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana pegunungan pegunungan yang lainnya. Akan tetapi pegunungan ini mempunyai nilai lebih, yaitu pegunungan ini terdapat unsure bahan baku semen. Sehingga banyak pabrik pabrik semen yang melirik pegunungan ini, salah satunya adalah pabrik semen gresik. Dari banyaknya pihak yang mencoba ingin mengeksploitasi kekayaan alam pegunungan ini, menimbulkan polemik diantara masyarakat Sibolga.

Mulai tahun 1992 hingga sekarang ini belum selesai polemik yang menyelimuti rakyat Sibolga. Bagi mereka yang peduli dengan pegunungan ini mendirikan gerakan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Bukit Barisan, gerakan inilah yang melopori penolakan atas penambangan pegunungan tersebut, serta masyarakat penghuni pegunungan tersebut yang menolak mentah mentah, masyarakat tersebut terkenal dengan nama sedulur sikep yang menjadikan tempat pencaharian pangan mereka semua di pegunungan ini. Di sisi lain, dari pihak pemerintahan daerah telah mendukung eksploitasi alam dengan berdirinya pabrik semen di pegunungan ini. Sesuai dengan keputusan surat Walikota atau Muspida Kotamadya Sibolga yang telah di terbitkan, menyatakan bahwa: Lokasi kawasan pertambangan golongan B terdapat di



Creating Bright Futures

berbagai daerah yang ada di wilayah Sumatera Utara.

Berdasarkan hal tersebut maka lokasi rencana kegiatan penambangan bahan baku butir

Semen Andalas hanya mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, Departemen ESDM bekerjasama dengan Semen Andalas tentang Perbukitan kawasan Kars bukit barisan berfungsi sebagai daerah resapan dan penyimpan air untuk mata air-mata air yang mengalir di pemukiman, baik di bagian Utara maupun bagian Selatan kawasan ini.

perlu menetapkan kawasan ini sebagai kawasan Kars yang dilindungi agar fungsinya tetap terjaga sehingga resiko bencana kekeringan bagi 8000 kk dan 4000 ha lahan pertanian di kemudian hari dapat dihindari. Dengan demikian, Penambangan yang dilakukan PT Semen Andalas di wilayah Pegunungan bukit barisan akan mengurangi debit air yang ada di sumber-sumber air di pegunungan Bukit Barisan, kondisi ini mengakibatkan ancaman bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan air. Selain berkurangnya debit air di wilayah pegunungan Kendeng, penambangan yang dilakukan PT Semen Andalas akan menimbulkan sedimentasi yang akhirnya akan memperparah banjir di wilayah sekitar Bukit Barisan. Dari kajian AMDAL tersebut sudah jelas, bagaimana dampak yang akan menerjang jika pegunungan ini dieksploitasi, akan tetapi jika kami mencoba melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi yang terjadi jika pegunungan ini jadi dieksploiter maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi di sana, kawasan tersebut akan menjadi kawasan industri yang akan membuka lapangan pekerjaan yang baru.

Penggangguran akan berkurang, angka pendapatan akan meningkat, upah minimum regional (UMR) di kota pati akan naik. Tapi ini perlu pengawalan dari pihak pemerintah terutama, maupun pihak manapun yang memang peduli terhadap nasib warga sekitar Sibolga, terutama *corporate social responsibility* (CSR) dari pabrik tersebut harus di alokasikan dengan benar, yang sekiranya mampu menunjang kebutuhan masyarakat, dan menjamin kesehatan masyarakat disekitarnya. Akan lebih indah jika pabrik yang akan berdiri di situ, mempunyai nilai prike-manusiaan yang tinggi, mereka memperdulikan hak hak masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat sekitar akan lebih nyaman dengan berdirinya pabrik disitu, masyarakat tidak merasa di rugikan saja.

4. *Pelihara Kearifan Lingkungan*

Kearifan lingkungan menjadi pilar utama dalam pengelolaan kawasan bagi masyarakat lokal untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya yang ada, kebudayaan lokal berkembang dan terus dijalankan sebagai dasar bagi masyarakat lokal untuk menjalankan kehidupannya di wilayah Kotamadya Sibolga. Kearifan lokal sering dimaknai sebagai suatu pemikiran yang tidak berdasarkan pada teori-teori yang ada, yang dipahami sebagai kepercayaan dan suatu tradisi yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat, tanpa mengkaji secara mendalam pemaknaan manfaat dari adanya kearifan lokal yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri.

Kearifan lingkungan atau kearifan lokal masyarakat (*local wisdom*) sudah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu mulai dari zaman pra-sejarah hingga saat ini, kearifan lingkungan merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan



Creating Bright Futures

dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat (Wietoler, 2007), yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, perilaku ini berkembang menjadi suatu kebudayaan di suatu daerah dan akan berkembang secara turun-temurun, secara umum, budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah, yang unsur-unsurnya adalah budaya suku-suku bangsa yang tinggal di daerah itu. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan oleh adanya kemajuan teknologi membuat orang lupa akan pentingnya tradisi atau kebudayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan, seringkali budaya lokal dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan di abad sekarang ini, sehingga perencanaan pembangunan seringkali tidak melibatkan masyarakat. Manusia harus memperlakukan lingkungan di sekitarnya sebagai tempat tinggal yang telah memberikan segalanya untuk kita, sehingga ada tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan mengelolanya, pengembangan teknologi sederhana di dalam mengelola sumberdayanya akan selalu dipertahankan untuk menjaga tradisi, memberi motivasi dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam mengelola wilayahnya sehingga peran masyarakat sebagai kunci utama dalam menjaga keseimbangan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya. Kearifan lokal harus menjadi yang terdepan dalam menjalankan program-program pengembangan wilayah di kawasan kars untuk mendorong masyarakat sebagai pelaku utama dalam usaha mengembangkan sumberdaya alamnya.

Sejak zaman dahulu masyarakat di wilayah Bukit Barisan telah hidup dari

pertanian lingkungan alam sekitar, mereka punya cara tersendiri untuk beradaptasi dengan alam di sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk kebutuhan sehari-hari dan lahan pertanian, ini terus berlangsung hingga sampai saat ini walaupun banyak orang yang sudah mulai meninggalkannya untuk mencari penghidupan di tempat lain yang biasanya di kota-kota besar, tetapi masyarakat di Kawasan pegunungan Bukit Barisan tetap melakukan kearifan lingkungan yang sudah menjadi budaya lokal yang masih tetap dikembangkan oleh masyarakat setempat. Banyak kearifan lingkungan di wilayah ini yang menjadi program bagi masyarakat untuk mengelola lingkungan dan sumberdaya air serta untuk menjaga kawasan kars.

Kearifan lingkungan masyarakat yang ada disekitar pergunungan Bukit Barisan dalam mengelola lingkungannya dilakukan secara bergotong royong untuk menjaga sumber-sumber air yang ada dengan melakukan perlindungan dan membuat aturan-aturan adat yang memberikan larangan-larangan kepada masyarakat yang memberikan penilaian negatif dari dampak yang akan ditimbulkan bila tidak dilakukan, untuk dapat menjaga dan mengelola sumber-sumber air yang ada. Kebudayaan lokal pada suatu daerah harus tetap dijaga kelestariannya agar kondisi alamiah dari lingkungannya tetap terjaga, banyak program-program pemerintah yang dilakukan di wilayah Sibolga dalam usaha pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam, tapi program-program yang dijalankan oleh pemerintah tidak menjadikan budaya lokal masyarakat sebagai referensi dalam menjalankan program pembangunan di wilayah ini, antara lain ambisi para penambang untuk mendirikan Pabrik semen di kawasan pegunungan bukit barisan tersebut. Kebudayaan masyarakat dan kearifan



Creating Bright Futures

lingkungan masyarakat menjadi pilar utama dalam pengelolaan lingkungan kawasan kars berkelanjutan yang harus didorong bersama oleh masyarakat dan pemerintah dalam menata lingkungan dan sumberdaya air sehingga menjadi lebih baik. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik apabila ada interaksi seimbang antara kebutuhan akan alam dan sistem pengelolaan terpadu yang dijalankan, baik oleh masyarakat setempat ataupun pemerintah.

Budaya masyarakat Sibolga memberikan gambaran yang nyata bagaimana suatu wilayah yang memiliki sumberdaya akan tetap terjaga sebagai aset berharga yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, kearifan lokal masyarakat pegunungan Bukit Barisan Sumatera Utara menjadi suatu pegangan bagi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sehingga pemerintah perlu menjadikan kearifan lokal sebagai bahan referensi rencana kerja dalam pembangunan dan pada akhirnya pembangunan berkelanjutan akan berjalan dengan sempurna dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama mencapai masyarakat adil dan makmur.

2. KESIMPULAN

Pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi kita meskipun tidak sekedar dimaknai terpenuhinya segala kebutuhan jasmaniah semata akan tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan, keselarasan dan kesinambungan. Ketiga kata terakhir terkadang menjadi kendala bagi pengambil keputusan manakala berhadapan dengan tuntutan ekonomi dan investasi. Disinilah kontradiksi muncul manakala kebijakan

publik harus berhadapan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Negara hadir sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa senantiasa peduli terhadap seluruh kepentingan masyarakat termasuk mereka yang berada dalam posisi lemah dalam mobilisasi dan politik tapi mereka teguh dan kuat dalam mempertahankan nilai-nilai kebajikan lingkungan. Tergerusnya nilai kearifan lokal berkaitan erat dengan menurunnya solidaritas dan kebersamaan dalam kegiatan gotong royong dalam masyarakat, rasa kepemilikan bersama terhadap sumber daya alam di lingkungannya dan hubungan harmonis antar sesama.

Ditengah hiruk pikuk kepentingan ekonomi dan dalih kemajuan peradaban eksistensi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam sebagai bagian kebutuhan dan mempertahankan hidupnya harus didukung dan dilestarikan guna menjaga keseimbangan antara pemanfaatan segala potensi yang terkandung didalamnya dengan lingkungan sebagai upaya pelestarian.

3. SARAN

Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan oleh adanya kemajuan teknologi membuat orang lupa akan pentingnya tradisi atau kebudayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan, seringkali budaya lokal dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan di abad sekarang ini, sehingga perencanaan pembangunan seringkali tidak melibatkan masyarakat.

Masyarakat tidak lagi sebagai object pembangunan tapi masyarakat memiliki peran besar dalam kegiatan ini baik dalam perencanaan, proses dan pelaksanaan. Perencanaan yang melibatkan masyarakat



Creating Bright Futures

tentu akan berdampak pada terjaganya ekosistem dan kelangsungan tata kelola pemanfaatan sumberdaya alam. Tidak hanya itu keterlibatan masyarakat secara aktif mampu menjaga kelestarian budaya dan keluhuran budi sebuah bangsa.

4. DAFTAR PUSTAKA

Arya Wardana, Wisnu, 2004. Dampak Pencemaran Lingkungan, Jogjakarta : Penerbit Andi

Bappenas, United Nation Population Funds, 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2000 – 2025, Jakarta: Penerbit BAPPENAS

Keraf A.S, 2002. Etika Lingkungan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Suharto, Edi Ph.D., 2005. Analisis Kebijakan Publik, Bandung : CV Alfabeta

Pardede I.A, Apriyanto Y., dan Fernando E.R. 2008. Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan, Bogor: Penerbit Institut